



Peran Guru dalam Menanamkan Nilai Demokrasi Bagi Siswa melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ratapan Gea^{1*}, Armstrong Harefa², Berkat Persada Lase³, Hendrikus Otniel Nasozaro Harefa⁴

¹⁻⁴ Universitas Nias, Indonesia

Alamat: Jalan Yos Sudarso 118 E/S Gunungsitoli, 22812

Korespondensi penulis : gearatapan@gmail.com*

Abstract. *This study aims to determine the role of teachers, the obstacles faced, and the role of teachers in overcoming these obstacles in instilling democratic values through Civics Education (PKn) subjects for students of SMP Negeri 4 Tuhemberua. Democratic values such as freedom of opinion, tolerance, deliberation, and responsibility are an important part in shaping students' character to become good citizens. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that teachers have a strategic role in instilling democratic values, both through the learning process in the classroom and through extracurricular activities. Teachers act as facilitators, motivators, and role models in fostering democratic attitudes in students. Obstacles faced include the lack of active student participation and limited learning media, but these can be overcome with a creative and participatory approach. Thus, Civics learning makes a significant contribution in shaping students' democratic attitudes and behavior in the school environment. Furthermore, in the learning process in the classroom, teachers use various active methods such as group discussions, deliberation simulations, and debates that aim to encourage students to get used to expressing opinions responsibly. Teachers also frequently relate material to current social phenomena, enabling students to see the relevance of democratic values in everyday life. Furthermore, teachers instill the values of tolerance and respect for differences through concrete examples and everyday behaviors both inside and outside the classroom. Another obstacle identified in this study was the students' diverse social backgrounds, which influenced their perspectives on democratic values. Some students still struggled to understand the importance of respecting others' opinions or were not yet accustomed to playing openly.*

Keywords: *Character Building, Civic Education, Democracy, Students, Teachers.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peran guru, kendala-kendala yang dihadapi, dan peran guru dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dalam menanamkan nilai demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi siswa SMP Negeri 4 Tuhemberua. Nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, toleransi, musyawarah, dan tanggung jawab merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik sebagai warga negara yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai demokrasi, baik melalui proses pembelajaran di kelas maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler. Guru bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan teladan dalam menumbuhkan sikap demokratis pada siswa. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya partisipasi aktif siswa dan keterbatasan media pembelajaran, namun dapat diatasi dengan pendekatan yang kreatif dan partisipatif. Dengan demikian, pembelajaran PKn berkontribusi signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku demokratis siswa di lingkungan sekolah. Lebih lanjut, dalam proses pembelajaran di kelas, guru menggunakan berbagai metode aktif seperti diskusi kelompok, simulasi musyawarah, dan debat yang bertujuan mendorong siswa untuk terbiasa menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Guru juga sering mengaitkan materi dengan fenomena sosial aktual, sehingga siswa mampu melihat relevansi nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru menanamkan nilai toleransi dan menghargai perbedaan melalui contoh-contoh konkret serta perilaku sehari-hari di dalam maupun di luar kelas. Kendala lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah latar belakang sosial siswa yang beragam, yang memengaruhi cara pandang mereka terhadap nilai-nilai demokrasi. Beberapa siswa masih kesulitan memahami pentingnya menghargai pendapat orang lain atau belum terbiasa berdiskusi secara terbuka.

Kata Kunci : Demokrasi, Guru, Pembentukan Karakter, Pendidikan Kewarganegaraan, Siswa.

1. LATAR BELAKANG

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat keberhasilan pendidikan dan usaha manusia dengan penuh tanggung jawab untuk membimbing anak-anak didik menuju kedewasaan. Proses pendidikan yang diselenggarakan secara formal di sekolah tidak lepas dari kegiatan belajar yang merupakan salah satu kegiatan pokok, oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan membutuhkan tenaga pendidik untuk mengadakan proses belajar mengajar dan akhirnya akan tercapai hasil belajar atau prestasi belajar. Aunurrahman (2009:5) mengungkapkan bahwa “Pendidikan harus memiliki keseimbangan dalam perannya membangun peserta didik sebagai warga Negara dunia, warga bangsa dan warga masyarakat”. Dengan demikian, secara filosofi arah pendidikan harus menyeimbangkan antara perkembangan global di satu sisi dan akar budaya dalam konteks lokal di sisi lain.”

Tujuan pendidikan menurut Masnur (2007:1) di dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa: “Pendidikan nasional yang baru ini sarat dengan tuntutan yang cukup mendasar karena harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.”

Peran guru secara umum adalah sebagai tugas pendidikan, meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Amiruddin (2013), memberikan definisi mengenai peran guru sebagai berikut yakni: “Peran guru dalam menjalankan tugas di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua dan mampu menarik simpati peserta didik sehingga pembelajaran seperti apapun yang diberikan hendaknya menjadi motivasi bagi peserta didik dalam mengajar.” Peran guru adalah keseluruhan tingkah laku atau tindakan yang dimiliki seseorang dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari status yang disandangnya, (Hartanti, 2017).

Peran guru secara umum adalah sebagai tugas pendidikan, meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Amiruddin (2013), memberikan definisi mengenai peran guru sebagai berikut yakni: “Peran guru dalam menjalankan tugas di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua dan mampu menarik simpati peserta didik sehingga pembelajaran seperti apapun yang diberikan hendaknya menjadi motivasi bagi peserta didik dalam mengajar.” Peran guru adalah keseluruhan tingkah laku atau tindakan yang dimiliki seseorang dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari status yang disandangnya, (Hartanti, 2017).

Menurut Prof. Pupuh Fathurrohman peran dan tugas guru yaitu mengarahkan kegiatan yang berifat pembiasaan terhadap siswa untuk dapat menerapkan nilai dan norma, membimbing sikap disiplin siswa, memantau dan mengawasi perilaku siswa dalam pergaulan, serta memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan siswa yang dapat menciptakan rasa aman, tertib, dan menyenangkan di lingkungan sekolah. Guru sebagai sosok panutan yang perlu ditiru, mempunyai peran penting dalam aplikasi pendidikan karakter disekolah maupun diluar sekolah. Sebagai seorang pendidik, guru menjadi sosok figur dalam rangka pengembangan karakter siswa yaitu guru harus mempunyai kepribadian yang baik dan terintegrasi memiliki mental yang sehat. Pendidikan berupaya untuk membentuk siswa yang unggul dalam hal pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), maupun keterampilan (*skill*).

Saiful Arif (2007, 58-59) mengatakan bahwa demokrasi tidak sebatas sistem politik maupun aturan-aturan formal yang terdapat dalam konstitusi saja. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan demokrasi ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai lokal yang sejalan demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai demokrasi seperti, penghormatan terhadap sesama, toleransi, penghargaan atas pendapat orang lain dan kesamaan sebagai warga dan menolak adanya diskriminasi. Hal senada dikemukakan oleh Paul Suparno (2004: 37) yang menyatakan bahwa nilai demokrasi merupakan nilai yang membentuk sikap tidak diskriminatif. Demokrasi menjunjung tinggi kesamaan hak setiap orang, yang artinya hak dirinya dan orang lain sama.

Merphin Panjaitan (2006:20), mengungkapkan bahwa: Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga Negara yang demokratis dan partisipatif melalui satuan pendidikan yang dialogial. Menurut Depdiknas (2006), Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Menurut Azyumardi Azra (2005:9), menyatakan bahwa: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, HAM, hak dan kewajiban warga Negara serta proses demokrasi.

Kemampuan siswa berdemokrasi merupakan partisipasi peserta didik menghargai pendapat teman sebangku ketika rapat di kelas, biasanya hal ini dalam membahas organisasi intra dan ekstra sekolah. Sekolah merupakan tonggak dasar penanaman budaya demokrasi bagi generasi penerus bangsa, karena di sinilah mereka bertemu dengan berbagai macam pikiran-pikiran, watak, karakter, budaya, dan agama. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran utama dalam menumbuhkan budaya demokrasi di kalangan pelajar. Oleh karena itu, sekolah harus menampilkan budaya demokratis dalam pengelolaan pendidikannya. Pengembangan nilai-nilai demokratis di sekolah juga perlu diterapkan untuk menghadapi era globalisasi yang diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia. Itu artinya, dunia pendidikan dalam mencetak sumberdaya manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan generasi yang demokratis, sehingga memiliki resistensi yang kokoh ditengah-tengah konflik peradaban.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: untuk mengetahui peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi bagi siswa melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa; untuk mengetahui kendala peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi bagi siswa melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; dan untuk mengetahui cara mengatasi kendala peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi bagi siswa melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

2. KAJIAN TEORITIS

Peran Guru Dalam Proses Pembelajaran

a. Pengertian Peran Guru

Peran adalah pola tingkah laku yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu, Hamalik (2010:190). Peran (*role*) merupakan keseluruhan tingkah laku yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Peran adalah pemain, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Fajri dan Senja, 2016).

Guru adalah figur yang menjadi teladan atau contoh dalam dunia pendidikan, keberadaan guru sangat penting dalam proses belajar mengajar dan pembentukan karakter positif dan kehidupan sosial peserta didik, (Handayani dan Abdul, 2020). Indrawan (2020:77) mengemukakan “Guru adalah orang yang mempunyai pekerjaan (mata pencahariannya, profesinya) adalah mengajar”. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Proses pendidikan dalam arti proses internalisasi dan sosialisasi adalah suatu nilai dari orang dewasa kepada orang yang dianggap perlu menerima suatu nilai, sehingga dalam bingkai sejarah peranan guru dari masa penjajahan sampai era kemerdekaan sangat penting dengan berbagai situasi dan kondisi zaman. H. Abdurrahman (2013:211), mengemukakan bahwa: Guru adalah anggota masyarakat yang berkompoten (cakap, mampu, dan mempunyai wewenang) mempunyai kepercayaan diri terhadap masyarakat dan untuk pemerintah untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran, serta tanggung jawabnya, baik dalam lembaga pendidikan jalur sekolah maupun luar lembaga sekolah.

Guru sebagai pengemban amanah pembelajaran maka harus orang yang memiliki pribadi yang mantap. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena ialah yang akan mencetak anak didiknya menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Hal ini tercermin melalui perannya dalam situasi pembelajaran melalui: peran sebagai pendidik dan pengajar, peran sebagai pembimbing, peran sebagai motivator.

b. Kendala Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Demokrasi

Guru memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai demokratis peserta didik. Menurut Tilaar (2004), pendidikan demokrasi tidak hanya mengajarkan tentang sistem pemerintahan, tetapi juga menumbuhkan sikap toleransi, keterbukaan, partisipasi aktif, dan penghormatan terhadap perbedaan. Guru sebagai fasilitator dan teladan menjadi aktor utama dalam internalisasi nilai-nilai tersebut di lingkungan sekolah. Senada dengan itu, menurut Somantri (2001), guru harus mampu menghidupkan praktik demokrasi di ruang kelas melalui pendekatan pembelajaran partisipatif, dialogis, serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengemukakan pendapat secara bebas namun bertanggung jawab.

Menurut hasil penelitian Wahab & Umiarso (2012), kendala utama yang dihadapi guru dalam menanamkan nilai demokrasi meliputi:

- Keterbatasan pemahaman guru tentang konsep demokrasi secara holistik. Banyak guru masih memaknai demokrasi secara sempit, sebatas sistem pemerintahan, bukan sebagai nilai atau sikap hidup.
- Keterbatasan metode pembelajaran yang demokratis. Banyak guru masih menggunakan pendekatan pembelajaran tradisional yang bersifat otoriter dan kurang memberi ruang partisipasi aktif peserta didik.
- Budaya sekolah yang belum kondusif, seperti minimnya forum dialog antar warga sekolah, dominasi keputusan sepihak, dan praktik diskriminasi.
- Keterbatasan sarana dan dukungan kebijakan sekolah, termasuk kurangnya pelatihan guru tentang pendidikan demokrasi.
- Latar belakang keluarga dan masyarakat yang cenderung otoriter juga dapat menjadi hambatan eksternal yang memengaruhi keberhasilan internalisasi nilai-nilai demokrasi.

c. Upaya Mengatasi Kendala Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Demokrasi

Untuk mengatasi kendala tersebut, berbagai upaya telah direkomendasikan dalam literatur:

○ Peningkatan Kompetensi Guru

Menurut Zubaedi (2011), penguatan kapasitas guru melalui pelatihan, workshop, dan pengembangan profesional berkelanjutan sangat penting agar guru memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menanamkan nilai demokrasi secara kontekstual dan aplikatif.

○ Pengembangan Metode Pembelajaran Demokratis

Pendekatan konstruktivistik yang menekankan pada partisipasi aktif siswa seperti diskusi kelompok, debat, studi kasus, dan simulasi dapat menciptakan suasana belajar yang demokratis (Joyce & Weil, 2000). Guru perlu diberi ruang untuk merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dari pengalaman dan perbedaan pendapat.

○ Penciptaan Iklim Sekolah yang Demokratis

Menurut Suyanto & Asep (2006), sekolah harus menjadi model miniatur demokrasi, di mana warga sekolah diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hubungan antara guru, siswa, serta pihak sekolah dibangun atas dasar keterbukaan dan saling menghargai.

- Kolaborasi dengan Orang Tua dan Masyarakat

Pendidikan nilai demokrasi tidak cukup dilakukan di sekolah saja. Oleh karena itu, perlu sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang konsisten dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi (Budimansyah, 2009).

- Penguatan Kebijakan dan Supervisi Sekolah

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menetapkan kebijakan yang mendukung praktik pendidikan demokrasi di sekolah melalui kurikulum, penilaian, dan regulasi yang mendorong partisipasi serta penghargaan terhadap nilai-nilai demokratis (UNESCO, 2015).

Penanaman Nilai Demokrasi

a) Pengertian Penanaman Nilai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penanaman berasal dari kata "*tanam*" yang artinya menaruh, menaburkan (paham ajaran) memasukkan, membangkitkan atau memelihara (perasaan, cinta kasih), sehingga dapat dikatakan penanaman memiliki arti proses, cara, atau perbuatan penanaman. Nilai adalah suatu sistem kepercayaan dimana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan. Kata penanaman juga dapat dikatakan sebagai Internalisasi yaitu sebuah proses pementapan atau penanaman keyakinan, sikap, nilai pada diri individu sehingga nilai-nilai tersebut menjadi perilakunya (*moral behaviour*). Ketika perilaku moral seseorang telah berubah, maka bisa dikatakan nilai-nilai itu sudah tertanamkan dalam dirinya. Dalam *Enciclopedia of Philosophy* dijelaskan, aksiologi *Value and Valuation*. Ada tiga bentuk *value and valuation*, yakni: Nilai, digunakan sebagai kata benda abstrak, seperti baik, menarik, bagus dan mencakup tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian, Soerjono Soekanto (2010:59).

Nilai sebagai kata benda konkret. Nilai di sini merupakan sebuah nilai atau nilai-nilai yang sering dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai. Kemudian dipakai untuk apa-apa yang memiliki nilai atau bernilai sebagaimana berlawanan dengan apa-apa yang tidak dianggap baik atau bernilai. Nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Dewey membedakan dua hal tentang menilai, ia bisa berarti menghargai dan mengevaluasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sebuah ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang dan

menjadi perhatiannya. Sebagai standar perilaku, tentunya nilai menurut seseorang untuk melakukannya.

b) Definisi Demokrasi

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ditangan rakyat.

c) Nilai-nilai Demokrasi

Menurut Budiardjo (2008), “nilai-nilai demokrasi mencakup prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan berpendapat, keadilan, dan supremasi hukum”. Nilai-nilai ini menjadi pilar penting dalam pelaksanaan sistem demokrasi yang sehat dan berkeadaban. Santoso (2015) mengemukakan bahwa terdapat beberapa nilai utama dalam demokrasi, antara lain:

- Kebebasan (*liberty*) : Setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapat, berorganisasi, dan menyampaikan aspirasi secara terbuka tanpa rasa takut.

- Persamaan (*equality*) : Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan dalam kehidupan bermasyarakat.
- Keadilan (*justice*) : Adanya keadilan sosial, ekonomi, dan politik yang merata bagi seluruh rakyat.
- Partisipasi : Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik.
- Kedaulatan rakyat: Rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokratis.

d) Indikator Nilai Demokrasi

Negara yang demokrasi akan terwujud apabila seluruh warga masyarakatnya mempunyai nilai-nilai demokrasi. Saiful Arif (2007, 58-59) mengatakan bahwa “demokrasi tidak sebatas sistem politik maupun aturan-aturan formal yang terdapat dalam konstitusi saja. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan demokrasi ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai lokal yang sejalan demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat”. Nilai-nilai demokrasi seperti, penghormatan terhadap sesama, toleransi, penghargaan atas pendapat orang lain dan kesamaan sebagai warga dan menolak adanya diskriminasi.

Hal senada dikemukakan oleh Paul Suparno (2004: 37) yang menyatakan bahwa “nilai demokrasi merupakan nilai yang membentuk sikap tidak diskriminatif”. Dalam nilai demokrasi mampu menjunjung tinggi kesamaan hak setiap orang, yang artinya hak dirinya dan orang lain sama. Dengan nilai tersebut mampu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dan bekerjasama dengan orang lain tanpa membedakan satu sama lain. Setiap orang mendapatkan hak dan perlakuan yang sama di mata negara tanpa menghiraukan latar belakang suku, ras, agama, tingkatan sosial, dan gender. Demokrasi tidak memperbolehkan terjadinya penindasan baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Nilai demokrasi mengajarkan individu untuk saling menghormati satu sama lain. Menurut Hendri B Mayo (2010:22), mengemukakan nilai dalam demokrasi, yaitu: menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga; menjamain terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur; mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*); menjamin tegaknya keadilan.

e) Tujuan, Fungsi dan Manfaat Nilai Demokrasi

Menurut Notonagoro (2009:120), tujuan demokrasi meliputi hal berikut, yaitu : kebebasan berpendapat; menciptakan keamanan dan ketertiban; mendorong partisipasi

aktif dalam pemerintahan; mengatur kekuasaan pemerintahan; pencegahan konflik. Demokrasi mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, adat istiadat, dan budaya yang menciptakan kondisi untuk latihan kebebasan politik tanpa diskriminasi. Konsep ini juga membawa dalamnya berbagai gagasan dan prinsip mengenai kebebasan, yang diwujudkan melalui praktik dan prosedur konkret. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Adapun fungsi dan peran demokrasi seperti yang diuraikan oleh Suseno (2013:208), yaitu: mewujudkan kedaulatan rakyat; menjamin hak asasi manusia; mendorong akuntabilitas pemerintah; melindungi keanekaragaman dan pluralisme; mendorong pembangunan ekonomi dan sosial; menjaga stabilitas politik; mendorong partisipasi masyarakat; menjaga keseimbangan kekuasaan. Fungsi dan peran demokrasi di Indonesia sangat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yang adil, partisipatif, dan berkeadilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Saiful Arif (2007, 58-59) mengatakan bahwa demokrasi tidak sebatas sistem politik maupun aturan-aturan formal yang terdapat dalam konstitusi saja. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan demokrasi ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai lokal yang sejalan demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini manfaat demokrasi menurut Ngalim Purwanto, yaitu: kesetaraan sebagai warga negara; memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum; pluralisme dan kompromi; menjamin hak-hak dasar; pembaruan kehidupan sosial; mendorong akuntabilitas pemerintah; melindungi keanekaragaman dan pluralisme; mendorong pembangunan ekonomi dan sosial.

Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut M. Nu'man Somantri (2001) Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan

Adapun Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan memiliki struktur keilmuan yang sangat jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum, serta filsafat moral/filsafat Pancasila yang memiliki visi yang kuat dalam pemberdayaan warga negara. Paradigma baru PKn sering disebut sebagai pendidikan kewarganegaraan yang bermutu karena dalam paradigma pendidikan kewarganegaraan mencakup tiga aspek keilmuan, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, *civic disposition*. Hamidsyukrie (2014:218, Vol. 21, No.3) menyebutkan, pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma barunya memiliki tugas mengembangkan pendidikan demokratis dengan mengemban tiga fungsi pokok, yakni: mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggungjawab warga negara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*).

Fungsi pertama, diarahkan pada terbentuknya warga negara yang cerdas. Kecerdasan yang dimaksud sejatinya bukan hanya kecerdasan dalam dimensi rasional saja, namun lebih dari itu haruslah meliputi seluruh ranah konstruksi diri dalam dimensi spiritual, emosional, dan sosial. Jika keseluruhan dimensi ini dapat dikembangkan, maka ciri khas

PKN akan nampak pada diri siswa yang memiliki kecerdasan multi dimensional. Fungsi kedua, tanggungjawab warga negara diarahkan pada pembentukan pribadi siswa yang memiliki rasa tanggungjawab mulai pada area yang terkecil (sempit) di sekitar kehidupan sehari-harinya sampai dengan kebutuhan global yang terkait hubungan paling luas antarmanusia. Fungsi ketiga, terwujudnya partisipasi warga negara dimaksudkan untuk membentuk pribadi siswa yang sejak dini telah terlibat pada aktivitas-aktivitas positif di lingkungan yang terdekat dengan kehidupannya sehari-hari sampai dengan lingkungan masyarakat global yang menggambarkan hubungan antar manusia pada dimensi yang lebih luas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif yang menghasilkan data yang membentuk hasil wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis serta catatan yang tidak terekam selama pengumpulan data. Subjek penelitian untuk mengetahui deskripsi sifat, tingkahlaku pada penerapan kepedulian masyarakat memajukan pendidikan, (Emzir 2011:2). Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Selain itu memerlukan penelitian yang triangulasi yaitu merupakan salah satu yang digunakan dalam penelitian untuk mengecek, mengoreksi keabsahan data dengan berbagai sumber wawancara, metode yang digunakan dalam observasi ini adalah metode deskriptif analisis, dimana menggambarkan secara gambaran pola penelitian. Sappaile (2007) menyebutkan bahwa Instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) maka analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara berlaku, sikap, pandangan proses berlangsung yang menghimpun fakta tapi tidak menguji hipotesis. Dalam pengumpulan data ini lebih menekankan pada teknik pengumpulan data observasi dan *interview*, walaupun tidak menutup kemungkinan teknik pengumpulan data lain dapat digunakan untuk memperoleh data tambahan. Proses analisa data yang diperoleh dalam penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Hasil Penelitian

- Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Demokrasi Bagi Siswa Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 4 Tuhemberua

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 4 Tuhemberua, terkait peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi bagi siswa melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Destina Zalukhu, S.Pd, selaku kepala sekolah yang menyatakan bahwa:

Guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran PKn dengan menciptakan suasana kelas yang demokratis. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat, bertanya, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Selain itu, sebagai teladan Guru harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi, seperti menghargai pendapat orang lain, bersikap adil, dan tidak memihak. Sikap guru yang demokratis akan menjadi model bagi siswa dalam kehidupan mereka di lingkungan sekolah maupun masyarakat

Selanjutnya juga disampaikan oleh Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Herman Syah Zai, S.Pd, yang menyatakan:

Sebagai guru PKn, penanaman nilai demokrasi saya terapkan melalui pendekatan yang baik kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan menggunakan metode pembelajaran interaktif, seperti diskusi kelompok, simulasi pelaksanaan pemilihan, dan tugas dalam bentuk studi kasus, untuk membantu siswa memahami konsep demokrasi secara lebih nyata. Kegiatan ini juga melatih siswa dalam mengemukakan pendapat dan menghargai perbedaan. Selain itu, melalui pengajaran nilai toleransi dan musyawarah, dengan mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan, baik dalam lingkup kelas maupun dalam organisasi sekolah. Hal ini bertujuan agar siswa terbiasa dengan prinsip demokrasi dalam kehidupan sosial mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan tersebut dan para siswa antara lain: Cika Astri Harefa, Jesdiven Zega, Perubahan Zega, maka dapat dikatakan bahwa dalam penanaman nilai demokrasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai demokrasi melalui pembelajaran PKn. Dengan menjadi fasilitator, teladan, serta menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, guru dapat membantu siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai demokrasi sejak dini di lingkungan sekolah akan

membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

- Apa Saja Kendala Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Demokrasi Bagi Siswa Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 4 Tuhemberua.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 4 Tuhemberua, terkait apa saja kendala peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi bagi siswa melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Destina Zalukhu, S.Pd, selaku kepala sekolah yang menyatakan bahwa:

Penanaman nilai demokrasi kepada siswa itu harus berdasarkan kerjasama seluruh warga sekolah, tidak hanya satu pihak, melainkan seluruh pihak harus bisa berkontribusi. Dalam hal ini, penanaman nilai demokrasi juga dapat terhambat karena banyak siswa kurang memahami konsep demokrasi secara mendalam karena kurangnya pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Herman Syah Zai, S.Pd sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, beliau mengungkapkan:

Penanaman nilai demokrasi hendaknya dilaksanakan oleh berbagai pihak manapun. pengaruh lingkungan sekitar yang kurang mendukung di lingkungan sekolah, seperti minimnya kebebasan siswa dalam berpendapat di sekolah maupun di rumah, keterbatasan bahan ajar yang relevan dan menarik tentang demokrasi sehingga membuat pemahaman siswa tentang demokrasi kurang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan tersebut dan para siswa antara lain: Cika Astri Harefa, Jesdiven Zega, Perubahan Zega, maka dapat dikatakan bahwa dalam penanaman nilai demokrasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan kewarganegeraan. Dengan menjadi fasilitator, teladan, serta menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, guru dapat membantu siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai demokrasi sejak dini di lingkungan sekolah akan membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

- Bagaimana Cara Mengatasi Kendala Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Demokrasi Bagi Siswa Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 4 Tuhemberua.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 4 Tuhemberua, terkait Bagaimana Cara Mengatasi Kendala Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Demokrasi Bagi Siswa Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Destina Zalukhu, S.Pd, selaku kepala sekolah yang menyatakan bahwa:

Untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, maka peran sentral dari guru merupakan faktor utama yang harus berperan aktif dalam hal ini. guru hendaknya meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi, menyederhanakan konsep demokrasi agar lebih mudah dipahami oleh siswa dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. selain itu guru juga baiknya menggunakan metode pembelajaran berbasis pengalaman, seperti studi kasus dan proyek sosial, agar siswa memahami demokrasi secara praktis.

Hal serupa juga ditambahkan oleh Bapak Herman Syah Zai, selaku guru PKn, mengatakan bahwa:

Dalam mengatasi kendala terhadap penanaman nilai demokrasi, dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan sumber belajar yang beragam, menggunakan media digital seperti video, infografis, dan platform pembelajaran daring untuk menarik minat siswa, mengintegrasikan berita atau isu-isu aktual dalam pembelajaran agar siswa lebih memahami penerapan demokrasi di dunia nyata, menciptakan lingkungan sekolah yang demokratis, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat dalam berbagai kegiatan sekolah, seperti pemilihan ketua kelas atau osis, mendorong sekolah untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan siswa. Selain itu juga menjadi teladan bagi siswa dalam menunjukkan sikap demokratis dengan menghargai pendapat siswa, bersikap adil, dan terbuka terhadap kritik serta saran, serta mampu memberikan contoh bagaimana nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Selanjutnya juga disampaikan oleh Cika Astri Harefa, selaku siswa kelas VIII-1, mengatakan bahwa:

Menurut saya, untuk meningkatkan pemahaman kami terhadap nilai demokrasi di sekolah, maka perlu menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, bapak/ibu guru hendaknya menerapkan metode diskusi, debat, simulasi sidang, untuk melatih siswa dalam berpikir kritis dan mengemukakan pendapat, mampu melakukan pendekatan yang mampu

mendorong partisipasi aktif kami dalam pembelajaran, sehingga kami bisa merasakan langsung praktik demokrasi dalam kelas, dan terutama dilingkungan sekolah.

Adapun ditambahkan oleh. Jesdiven Zega, merupakan siswa kelas VIII-2, mengungkapkan bahwa:

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka perlu memberikan kesempatan kepada kami untuk berpendapat dalam berbagai kegiatan sekolah, dan dihindari tindakan *bullying* sehingga kami berani menyampaikan pendapat dimuka umum.

Hal selaras juga disampaikan oleh Perubahan Zega (Siswa Kelas VIII-3), mengungkapkan bahwa:

Guru selalu bersikap adil, jadi kalau ada perbedaan pendapat, beliau tidak memihak. Kami diajarkan untuk menghormati pendapat teman. Kalau ada yang bertengkar atau tidak setuju, guru membimbing kami untuk berdiskusi dan menyelesaikan secara musyawarah.

Dengan peran aktif guru dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, pembelajaran nilai-nilai demokrasi akan lebih efektif dan mampu membentuk karakter siswa yang demokratis dalam berpikir dan bertindak.

Pembahasan

Demokrasi merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai demokrasi harus ditanamkan sejak dini agar siswa dapat memahami pentingnya partisipasi aktif, kesetaraan, dan kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi salah satu mata pelajaran yang memiliki peran utama dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan teladan bagi siswa dalam memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi.

- Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Demokrasi Bagi Siswa Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Menurut Jones dalam (Rizal 2010:5) Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran demokrasi sebagai pemegang pengetahuan mutlak menjadi pembimbing yang mendukung eksplorasi siswa atas pengetahuan tersebut dan ini menuntut guru untuk memiliki keterampilan pedagogis yang kuat dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi, agar dapat memodelkan nilai-nilai tersebut kepada siswa. Demokrasi merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai demokrasi harus ditanamkan sejak dini, terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Guru sebagai fasilitator dan pendidik

memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa agar mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Guru memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai demokrasi melalui mata pelajaran PKn. Melalui pembelajaran yang demokratis, kontekstual, dan berbasis pengalaman, siswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan mereka. Di SMP Negeri 4 Tuhemberua, peran ini diwujudkan melalui strategi pembelajaran aktif, keteladanan guru, dan penciptaan lingkungan belajar yang mendukung.

- Kendala Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Demokrasi Melalui Bagi Siswa Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut ramdani di dalam (Fadhila Az Zhara, 2021:3), tantangan dalam penanaman nilai demokrasi kepada siswa masih terlihat adanya praktek intoleran dan kurangnya partisipasi dari siswa. Kondisi ini sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang menghargai keberagaman. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, terutama dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, kebebasan berpendapat, toleransi, dan tanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, guru menghadapi berbagai kendala dalam menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai tersebut secara efektif di lingkungan sekolah.

- Bagaimana Cara Mengatasi Kendala Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Demokrasi Bagi Siswa Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Menurut Wina Sanjaya (2013: 126), Dalam mengatasi kendala penanaman nilai demokrasi kepada peserta didik dengan langkah pembelajaran kelompok atau fasilitator pembelajaran aktif didalam ruangan kelas. Nilai-nilai demokrasi merupakan bagian penting dalam pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Namun, dalam praktiknya, guru menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi agar pembelajaran dapat berjalan efektif.

Peran guru sangat sentral dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui mata pelajaran PKn, khususnya di SMP Negeri 4 Tuhemberua. Meski dihadapkan pada berbagai kendala, guru dapat mengatasinya dengan strategi yang kreatif dan kolaboratif. Dengan demikian, siswa dapat tumbuh menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokratis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi bagi siswa melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 4 Tuhemberua sangatlah penting dan strategis. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan teladan dalam kehidupan berdemokrasi. Melalui metode pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan kontekstual, guru mampu membimbing siswa untuk memahami serta menerapkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Kendala peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kendala yang sering muncul, seperti kurangnya minat siswa, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya dukungan lingkungan sekitar, direspons oleh guru dengan berbagai strategi kreatif dan adaptif. Guru berupaya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif, menggunakan metode pembelajaran yang variatif, serta memberikan contoh nyata sikap demokratis dalam keseharian. Dengan komitmen dan inovasi yang terus dilakukan, guru mampu meminimalkan hambatan-hambatan tersebut sehingga proses penanaman nilai demokrasi tetap dapat berjalan secara efektif dan berdampak positif bagi siswa.

Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menanamkan nilai demokrasi bagi siswa melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 4 Tuhemberua yaitu melalui pendekatan yang kreatif, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, serta membangun komunikasi yang baik dengan siswa dan pihak sekolah, guru mampu mengurangi hambatan tersebut. Dengan dedikasi dan strategi yang tepat, guru berhasil menjaga proses penanaman nilai demokrasi agar tetap berlangsung secara efektif dan bermakna bagi perkembangan karakter siswa.

Berikut ini peneliti menyajikan beberapa saran yakni diharapkan guru berperan untuk memotivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah tentang pentingnya sikap positif berdemokrasi; siswa berperan aktif dan sungguh-sungguh dalam proses belajar untuk mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Terutama dalam mengutamakan kepentingan bersama dalam mewujudkan mufakat melalui demokrasi; hendaknya kepada kepala sekolah dan guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam mengarahkan sikap dan tingkah laku peserta didik dalam pembentukan berdemokrasi untuk membentuk karakter anak bangsa.

References

- Alamsyah, A. R. (2014). *Pendidikan demokrasi pada masyarakat* (hlm. 77). Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Aswan, S. (2008). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Djamarah, S. B., & Zain, A. (2005). *Strategi belajar mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huberman, A. M. (2005). *Metodologi penelitian*. Bandung: Sony BMG.
- Kosim, N. (2016). *Strategi dan metodologi pengajaran* (hlm. 39). Bandung: Arfino Raya.
- Mayo, H. B. (2012). *Nilai demokrasi* (hlm. 87). Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. (2005). *Menjadi guru profesional*. Bandung: Rosda.
- Munthe, B. (2009). *Desain pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Notonagoro. (2013). *Demokrasi Pancasila* (hlm. 9). Jakarta: Kencana.
- Octavia, S. A. (2012). *Sikap dan kinerja guru profesional*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Purwanto, N. (2012). *Desain pembelajaran demokratis* (hlm. 23). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 1*.
- Sugiyono. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suprihatin Krum, J. (2014). *Guru profesional: Pedoman kinerja, kualifikasi & kompetensi guru*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suseno. (2013). *Dasar-dasar ilmu pendidikan* (hlm. 67). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.